

Analisis Ketersediaan Dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Teori Neighborhood Unit Di Kawasan Perkotaan Majalengka

Analysis Of Availability And Level Of Educational Facilities Based On Neighborhood Unit Theory In Majalengka Urban Area

Zidan Rizky Akbar^{1*}, Firmansyah², Apriadi Budi Raharja³

^{1,2,3}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pasundan

Info Artikel

Artikel Masuk : 11/01/2024
Artikel Diterima : 01/07/2024
Tersedia Online : 21/11/2025

Kata kunci :

*Neighborhood Unit,
Sarana Pendidikan,
Tingkat Pelayanan, dan
Walking Distance*

Keyword :

*Neighborhood Unit,
Educational Facilities,
Level of Service, and
Walking Distance*

Abstrak

Konsep Neighborhood Unit merupakan konsep kawasan permukiman yang terdapat fasilitas penunjang yaitu salah satunya fasilitas pendidikan. Konsep unit diterapkan dalam menjangkau jarak jangkauan penduduk ke tempat fasilitas pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Majalengka dilihat dari persebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata hal ini disebabkan sebaran hanya terpusat di Kawasan Perkotaan Majalengka. Terjadinya ketidakseimbangannya pemerataan fasilitas pendidikan ini yang tidak beriringan dengan segi kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan. Analisis sebaran fasilitas pendidikan di PKLP Majalengka untuk mengetahui apakah sebaran fasilitas pendidikan yang ada telah mencukupi sesuai kriteria jarak jangkauan pelayanan berdasarkan pendekatan Neighborhood Unit. Tujuan dalam penelitian ini yaitu terumuskannya wilayah yang terlayani berdasarkan SNI dan teori neighborhood unit dan melihat apakah masyarakat memanfaatkan fasilitas pendidikan berdasarkan kedekatan jarak dengan rumah di PKLP Majalengka. Pendekatan studi menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data hasil observasi dan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan fasilitas pendidikan hanya tersebar di tengah pusat perkotaan dan hasil tingkat pelayanan menurut peraturan SNI 2004 dan Neighborhood unit bahwa permukiman PKLP Majalengka belum terlayani 100% oleh fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA. Dengan area walking distance yang berbeda-beda. Hal ini masyarakat PKLP Majalengka belum memanfaatkan fasilitas pendidikan menurut kedekatan jarak dengan rumah menurut peraturan SNI 2004 dan pendekatan spasial.

Abstract

The Neighborhood Unit concept refers to a residential area supported by facilities, one of which is educational facilities. This concept is applied to measure the distance residents travel to access educational facilities. In Majalengka Regency, the availability of educational facilities is unevenly distributed, concentrated mostly in the urban area of Majalengka. This imbalance is not matched by the quality and quantity of educational facilities. An analysis of the distribution of educational facilities in PKLP Majalengka aims to determine whether the existing facilities meet service distance criteria based on the Neighborhood Unit approach. The study's goal is to define serviced areas according to SNI standards and Neighborhood Unit theory, and to assess whether the community utilizes educational facilities based on proximity to their homes in PKLP Majalengka. The study uses qualitative descriptive analysis with data collected through observation and questionnaires. The analysis reveals that educational facilities are only available in the urban center, and according to SNI 2004 regulations and the Neighborhood Unit approach, settlements in PKLP Majalengka are not fully served (100%) by elementary, junior, and senior high school facilities, with varying walking distance areas. The community in PKLP Majalengka has not fully utilized educational facilities based on proximity to their homes according to SNI 2004 regulations and spatial approach.

¹ abrahamja2019@gmail.com

1. Pendahuluan

Pendidikan berperan penting dalam perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi dengan menyediakan pengetahuan dan keterampilan untuk bersaing (Nurkholis, 2013). Pendidikan juga penting untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan harus dapat diakses seluruh masyarakat. Sarana pendidikan meliputi fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar agar berjalan lancar, efektif, dan efisien, dengan mempertimbangkan jangkauan layanan dan jumlah penduduk (Eko, 1987 dalam Endang & dkk, 2014).

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan, penyediaan sarana pendidikan harus memperhatikan desain keruangan dan kelompok lingkungan yang membentuk blok bangunan sesuai konteks area. Penempatan fasilitas didasarkan pada jangkauan radius layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan pelayanan optimal. Konsep ideal bagi anak usia sekolah adalah sekolah ramah anak, yaitu sistem pembelajaran yang didukung oleh kondisi sosial, fisik, dan emosional yang positif, sehat, serta aman (Shaeffer, 1999 dalam Rangkuti & Maksum, 2019).

Konsep Neighborhood Unit menempatkan SD di tengah permukiman dengan jarak sekitar 400 meter atau 5-10 menit jalan kaki. SMP berada dekat permukiman dengan jarak 800 meter dan waktu tempuh ≥ 20 menit transportasi, sedangkan SMA maksimal 1600 meter dengan waktu tempuh 60 menit transportasi (Yuchi, 2020). Neighborhood unit merupakan lingkungan permukiman dalam kota yang memiliki batas jelas dan dilengkapi fasilitas sosial dasar untuk melayani sejumlah penduduk, serta didukung oleh interaksi sosial dan rasa kebersamaan (Porteous dalam Suryanto, 1989).

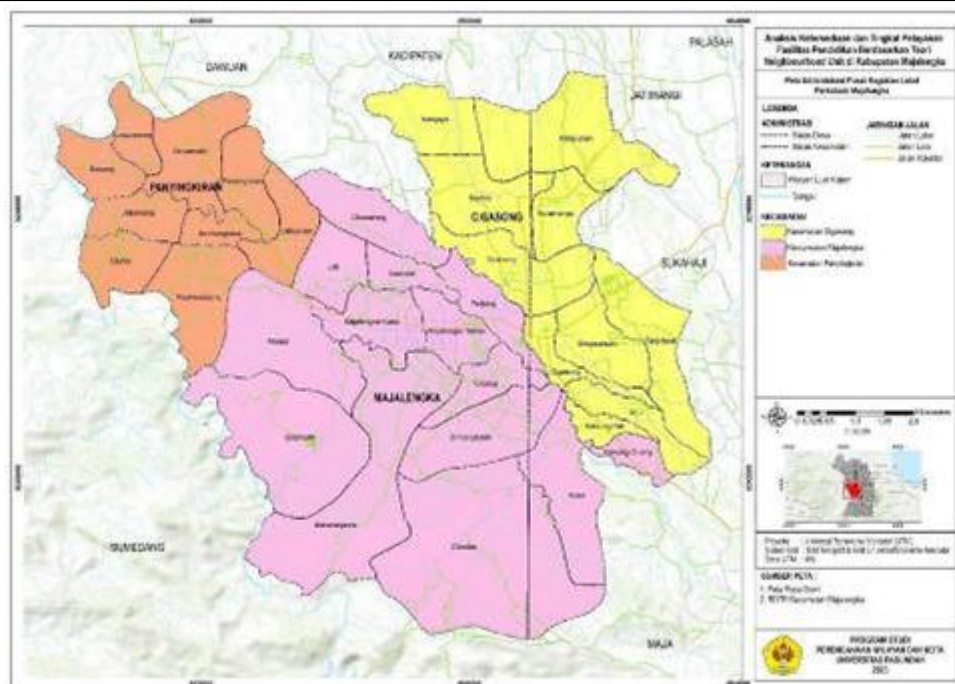
Kementerian Pendidikan melalui Peraturan Menteri No 17/2017 mengatur sistem zonasi agar siswa lebih diutamakan berdomisili dekat sekolah, dengan sekolah negeri wajib menerima minimal 90% peserta dari lingkungan sekitar. Pemerintah memperhatikan sarana, prasarana, dan jumlah penduduk agar anak dapat mengakses pendidikan di sekolah negeri terdekat.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, Kawasan Perkotaan Majalengka diperuntukan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, pusat komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Kawasan ini terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Panyingkiran dan beberapa desa yang memiliki karakteristik variabel yang kompleks, baik itu aspek lingkungan, aksesibilitas, kependudukan, pola distribusi.

Penelitian ini meneliti ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kecamatan Majalengka, Cigasong, dan Panyingkiran. Permasalahan utama adalah pelayanan pendidikan yang belum optimal untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Tujuannya adalah mengoptimalkan ketersediaan dan pelayanan fasilitas pendidikan berdasarkan standar SNI dan teori neighborhood unit serta memetakan pemanfaatan fasilitas berdasarkan jarak hunian di PKLP Majalengka.

Gambar 1. Peta PKLP Majalengka

Sumber : Hasil Analisis, 2022



2. Data Dan Metode

2.1 Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer yang dilakukan melalui observasi lapangan. Observasi ini berupa pengamatan kondisi eksisting sebaran fasilitas pendidikan di PKLP Majalengka, termasuk karakteristik penduduk, sebaran sekolah, lokasi fasilitas, serta kondisi jaringan jalan menuju fasilitas. Data diambil dengan alat tulis dan dokumentasi untuk mengetahui kondisi fisik fasilitas, serta angket untuk mengumpulkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan fasilitas pendidikan.

Jumlah anggota sampel menggunakan rumus Taro, yang digunakan apabila populasi sudah diketahui (Yuchi, 2020). Rumus tersebut adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Anggota Sampel

N = Populasi

d2 = Presisi atau kesalahan error 5%

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah KK di PKLP Majalengka yaitu sebanyak 28.606 KK. Yang terbagi di Kecamatan Majalengka sebanyak 14.610 KK, Kecamatan Panyingkiran sebanyak 6433 KK dan Kecamatan Cigasong sebanyak 7.553 KK di. Sehingga sampel yang akan diteliti sesuai rumus adalah sebagai berikut :

a) Kecamatan Majalengka

$$n = \frac{14.610}{14.610 \times (0,05^2) + 1}$$

$$n = \frac{14.610}{14.610 \times 0,0025 + 1}$$

$$n = \frac{36,525 + 1}{14610}$$

$$n = \frac{37,525}{14610}$$

$$n = 389$$

b) Kecamatan Panyingkiran

$$n = \frac{6.433}{6.433 \times (0,05^2) + 1}$$

$$n = \frac{6.433}{6.433 \times 0,0025 + 1}$$

$$n = \frac{16,0825 + 1}{6.433}$$

$$n = \frac{17,08}{6.433}$$

$$n = 377$$

c) Kecamatan Cigasong

$$n = \frac{7.553}{7.553 \times (0,05^2) + 1}$$

$$n = \frac{7.553}{7.553 \times 0,0025 + 1}$$

$$n = \frac{18,8825 + 1}{7.553}$$

$$n = \frac{19,88}{7.553}$$

$$n = 380$$

2.2 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengunjungi instansi terkait yaitu BAPPEDALITBANG Kabupaten Majalengka, Dinas PUPR Kabupaten Majalengka, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, BPS Kabupaten Majalengka. Pengumpulan data disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan checklist data.

2.3 Metode Analisis

1. Teridentifikasinya Ketersediaan sekolah di jenjang SD,SMP,SMA/SMK di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan (PKLP) Majalengka.
Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dari instansi-instansi terkait, observasi lapangan, dokumentasi kondisi eksisting, serta penelusuran data spasial via Google Earth, lalu dianalisis dengan ArcGIS untuk mengetahui ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan di PKLP Majalengka.
2. Teridentifikasinya Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan jenjang SD,SMP,SMA/SMK berdasarkan pendekatan Neighborhood Unit di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan (PKLP) Majalengka.
Analisis menggunakan pemodelan SIG dengan metode buffering untuk mengidentifikasi wilayah terlayani dan tidak terlayani berdasarkan survei kuisioner, radius pelayanan SNI, dan Walking Distance. Peta sebaran fasilitas dianalisis dengan buffering di ArcGIS untuk menentukan cakupan (range) radius wilayah pelayanan,

kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi berdasarkan letak obyek yang berada di dalam atau di luar batas buffer.

A. Tingkat Pelayanan

Analisis ini berfungsi untuk melihat persentase wilayah yang telah terlayani oleh fasilitas pendidikan tahun 2022 berdasarkan fasilitas pendidikan eksisting dan radius pencapaiannya.

Tabel 1. Radius Fasilitas Pendidikan

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

No	Jenis	Radius pencapaian	Lokasi
1	Sekolah Dasar	1.000 m	Penempatan fasilitas diintegrasikan dengan taman dan berada di dekat hunian.
2	Sekolah Menengah Pertama	1.000 m	Penempatan fasilitas ini diintegrasikan dengan fasilitas lapangan olahraga dan dapat dijangkau oleh kendaraan.
3	Sekolah Menengah Atas	3.000 m	

Tingkat pelayanan adalah kemampuan daya layan sarana pendidikan dalam melayani penduduk berdasarkan radius pencapaian yang telah ditentukan oleh SNI 03-1733 Tahun 2004. Untuk melihat wilayah yang telah terlayani oleh sarana pendidikan dapat dilihat berdasarkan rumus di bawah ini :

$$\text{Wilayah Pelayanan} = \frac{\text{Total Radius Pelayanan}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$$

B. Area Walking Distance

Chiara mengemukakan bahwa radius sekolah dasar dari lokasi rumah yaitu ¼ mil sampai ½ mil (400 m sampai 800m). Di wilayah padat, sekolah harus berada dalam area walking distance maksimum tersebut, sementara di wilayah jarang penduduk, sekolah boleh di luar area ini dengan fasilitas angkutan. Berikut penjelasan area walking distance pada fasilitas pendidikan.

Tabel 2. Radius Walking Distance

Sumber : Urban Planning & Design Criteria Joseph de Chiara dalam (Sugiar, 2019)

No	Jenis Fasilitas	Walking Distance
1	Sekolah Dasar	400 – 800 Meter
2	Sekolah Menengah Pertama	800 – 1.200 Meter
3	Sekolah Menengah Atas	1.600 Meter menggunakan angkutan umum

Analisis area walking distance mengukur jarak berjalan kaki dari permukiman ke fasilitas pendidikan berdasarkan teori Joseph de Chiara untuk SD hingga SMA. Radius dibuffer dan diukur menggunakan tools penggaris di ArcGIS, lalu jarak tiap permukiman dijumlahkan untuk mendapatkan rata-rata jarak ke fasilitas pendidikan (Sugiar, 2019)

3. Analisis Karakteristik masyarakat Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan (PKLP) Majalengka dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan berdasarkan kedekatan jarak dengan rumah.

Metode analisis studi ini adalah deskriptif kuantitatif dari wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Data disederhanakan agar mudah diinterpretasi, kemudian dikomparasi secara spasial (SNI dan Walking Distance) dengan hasil survei, dan dianalisis secara deskriptif menggunakan persentase (%).

Tabel 3. Tabel Kesesuaian Fasilitas Pendidikan

Sumber : Hasil Analisis, 2022

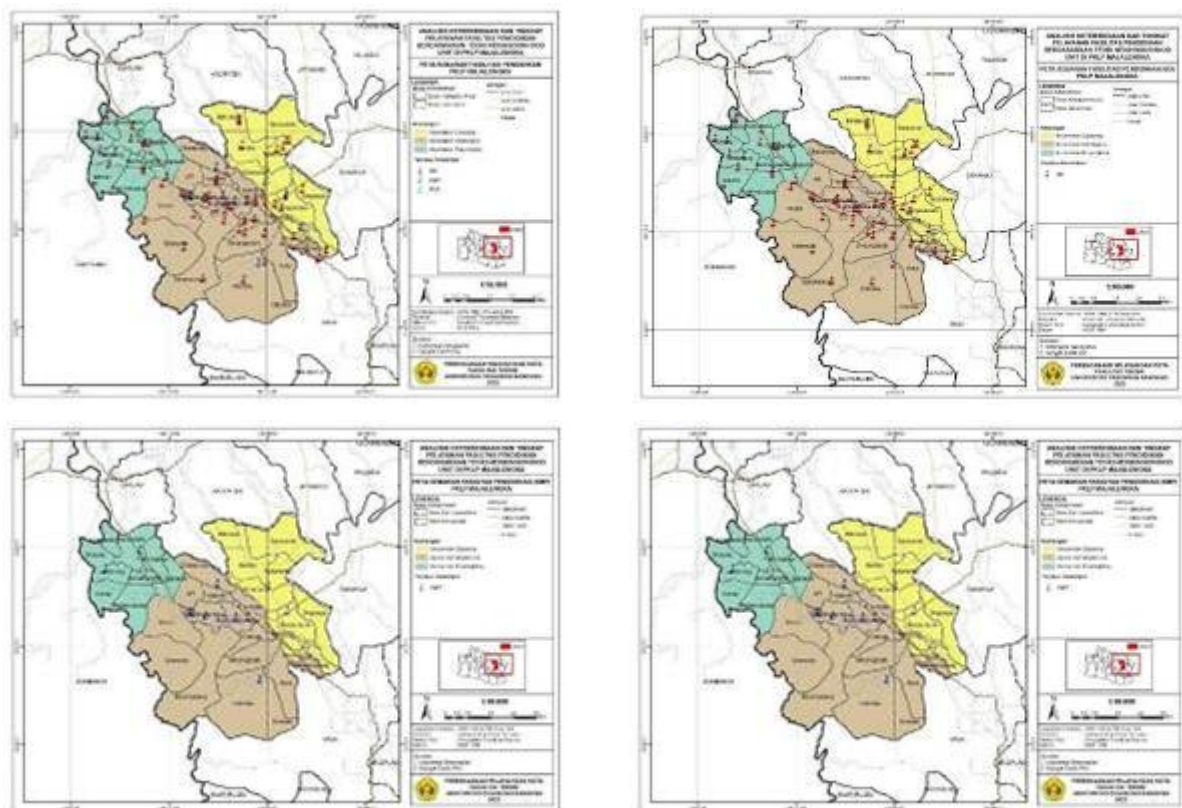
Persyaratan	Persentase	Keterangan
SNI 2004	=100%	Kurang dari 100 % mengindikasikan bahwa menurut peraturan sni fasilitas pendidikan belum menjangkau permukiman sekitar. Hal ini
Walking Distance	<100%	Kurang dari 100 % mengindikasikan bahwa menurut walking distance fasilitas pendidikan sudah menjangkau permukiman
Hasil Kuisoner	=100%	Kurang dari 100% mengindikasikan bahwa menurut hasil penyebaran kuisoner masyarakat di wilayah PKLP Majalengka belum memanfaatkan fasilitas pendidikan menurut peraturan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis identifikasi ketersediaan sekolah di jenjang SD, SMP, SMA/SMK di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan (PKLP) Majalengka

Gambar 2. Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan PKLP Majalengka

Sumber : Hasil Analisis, 2022



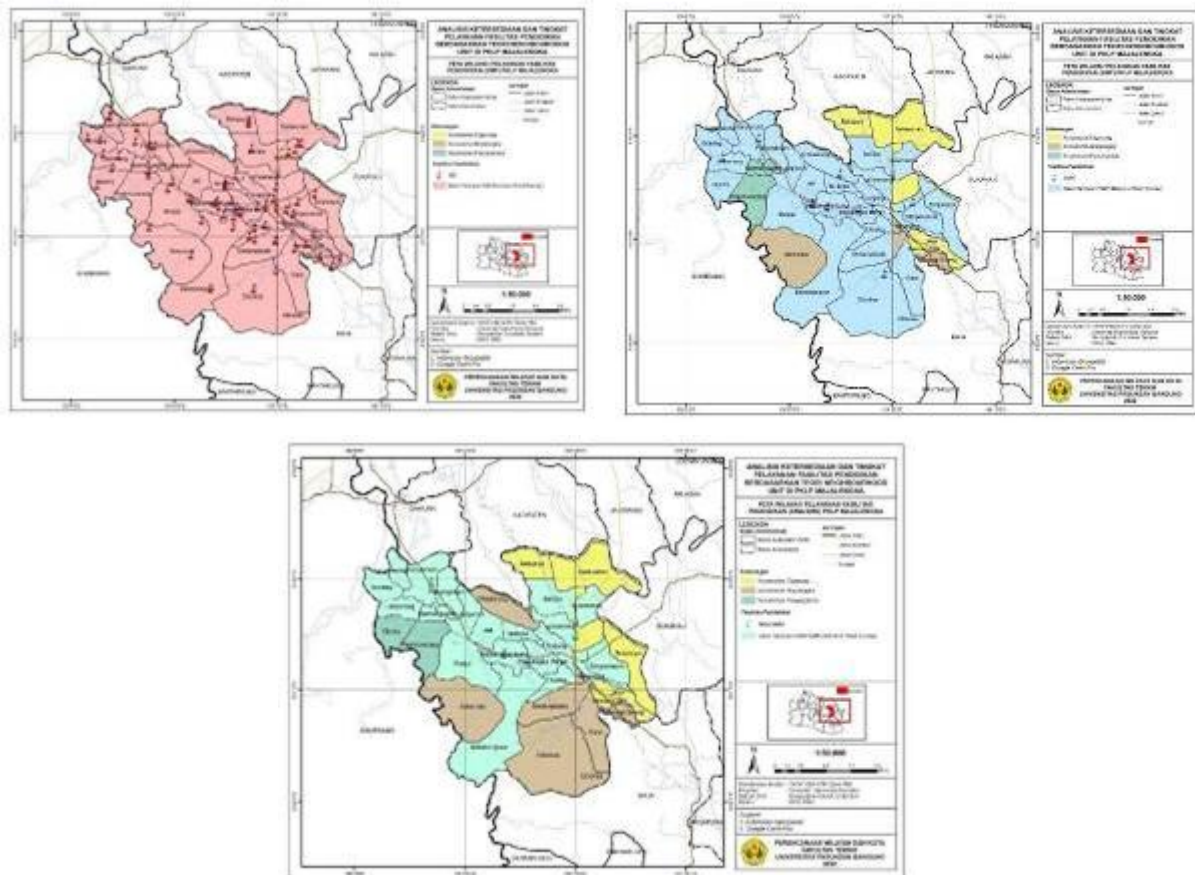
Distribusi fasilitas pendidikan di PKLP Majalengka (Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Cigasong) berdasarkan data Dinas Pendidikan menunjukkan 79 titik. Sebaran SD sudah merata di tiap Desa/Kelurahan, namun SMP dan SMA lebih terkonsentrasi di pusat

kecamatan dan wilayah padat. Semakin jauh dari pusat, fasilitas semakin berkurang. Aksesibilitas di PKLP Majalengka cukup baik dan mudah dilalui.

3.2. Analisis tingkat pelayanan fasilitas pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan (PKLP) Majalengka

Gambar 3. Peta tingkat pelayanan fasilitas pendidikan PKLP Majalengka berdasarkan hasil kuisioner

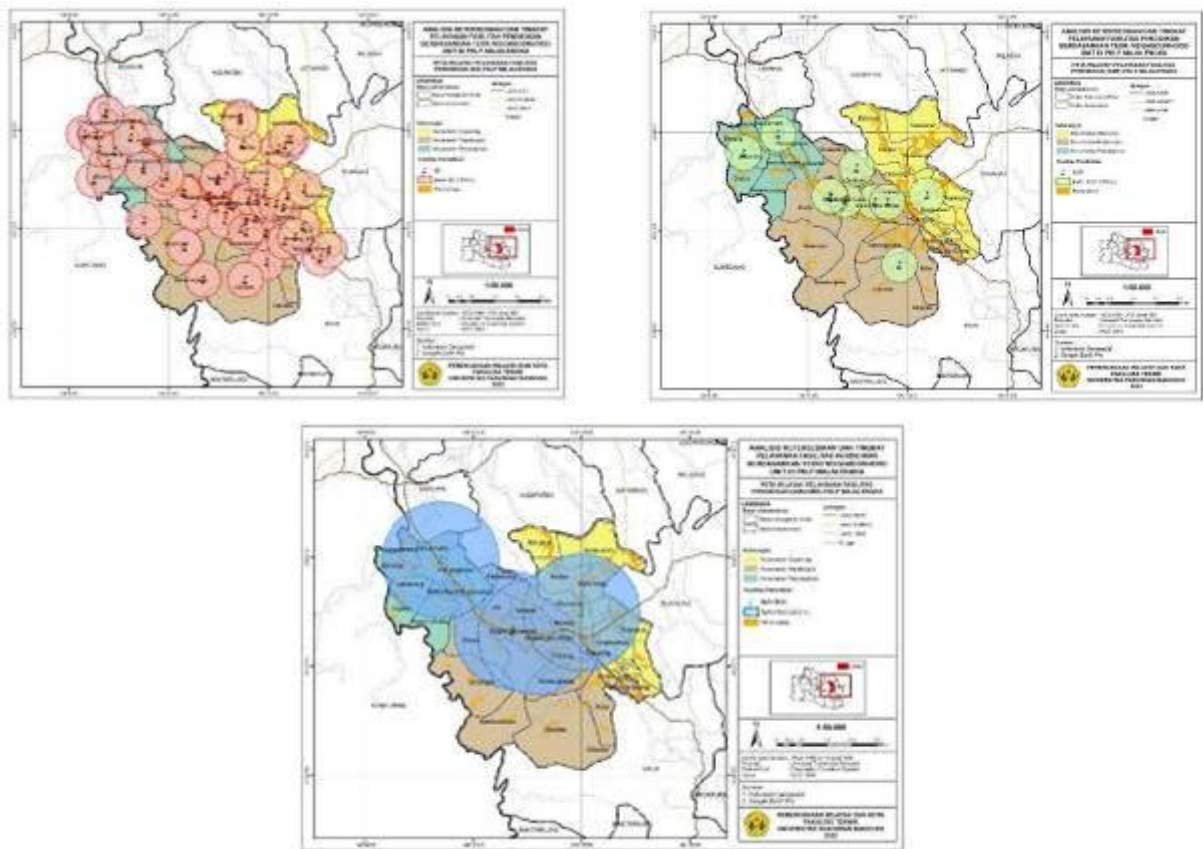
Sumber : Hasil Analisis, 2022



Analisis tingkat pelayanan ini dilakukan untuk melihat wilayah yang telah terlayani oleh fasilitas pendidikan berdasarkan hasil survei kuisioner, dengan menilai keterlayanan fasilitas pendidikan eksisting dari tingkat SD hingga SMA.

Gambar 4. Peta tingkat pelayanan fasilitas pendidikan PKLP Majalengka berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Berdasarkan SNI 03-1733-2004, jarak optimal fasilitas pendidikan adalah 1000 m untuk SD dan SMP, serta 3000 m untuk SMA. Berdasarkan peta menunjukkan adanya tumpang tindih radius pelayanan.

Jangkauan fasilitas SD di PKLP Majalengka padat di tengah kecamatan karena sebaran fasilitas pendidikan sekolah dasar memusat di wilayah perkotaan. Desa di Kecamatan Majalengka yang belum terlayani penuh adalah Cibodas, Cijati, Cikasarung, Kulur, Munjul, Sidamukti, dan Sindangkasih. Kecamatan Panyingkiran sudah terlayani 100%, sedangkan di Kecamatan Cigasong belum terlayani penuh Desa Tenjolayar, Batujaya, dan Karayunan.

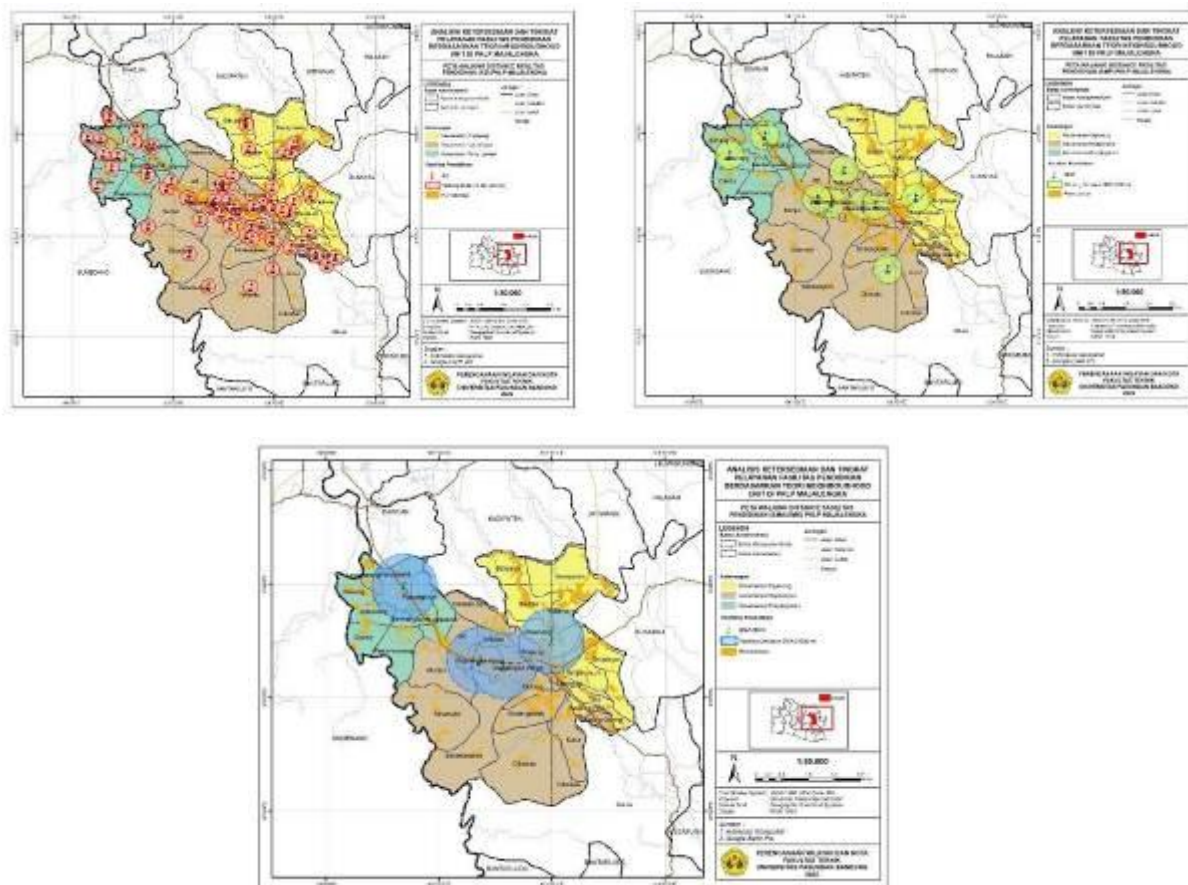
Jangkauan fasilitas SMP di PKLP Majalengka padat hanya di Kecamatan Majalengka, dengan 7 sarana yang melayani 47% permukiman. Desa yang belum terlayani adalah Munjul, Sidamukti, Babakan Jawa, Sindangkasih, Cicurug, Kawunggirang, Kulur, dan Cibodas. Kecamatan Panyingkiran dengan 2 sarana melayani 30% permukiman. Desa yang belum terlayani adalah Bantrangasana, Leuwiseeng, Pasirmuncang, dan Cijurey. Kecamatan Cigasong dengan 1 sarana hanya melayani 7% permukiman.

Jangkauan fasilitas SMA di PKLP Majalengka hanya di pusat kota dengan radius 3000 meter yang saling tumpang tindih. Kecamatan Majalengka dengan 2 sarana melayani 91% permukiman, desa belum terlayani adalah Sidamukti, Babakanjawa, Cibodas, Kulur, dan Kawunggirang. Kecamatan Panyingkiran dengan 1 sarana melayani 90%, desa belum terlayani adalah Cijurey dan Pasirmuncang. Kecamatan Cigasong dengan 1 sarana

melayani 73%, desa belum terlayani adalah Batujaya, Karayunan, Tenjolayar, Tajur, dan Kawunghilir. Secara total, SMA melayani 86% permukiman di PKLP Majalengka.

Gambar 5. Peta *Walking Distance* Fasilitas Pendidikan PKLP Majalengka berdasarkan teori Neighborhood Unit

Sumber : Hasil analisis, 2022



Konsep Neighborhood Unit oleh Josep De Chiara menetapkan walking distance untuk SD 400 m, SMP 800 m, dan SMA 1600 m. Analisis menunjukkan SD di wilayah tengah perkotaan sesuai jarak ini, tapi wilayah pinggiran belum terjangkau. SMP belum terjangkau di Babakan Jawa, Kulur, Kawunggirang, Sindangkasih, Cicurug, Tonjong, Tarikolot, Cijati, dan Sidamukti. SMA hanya terjangkau di Majalengka Kulon, Karyamukti, dan Cicenang.

3.3. Analisis karakteristik masyarakat pusat kegiatan lokal kawasan perkotaan (PKLP) Majalengka dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan berdasarkan kedekatan jarak dengan rumah

Tabel 4. Komparasi fasilitas pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan pendekatan spasial dengan hasil survei penyebaran kuisisioner PKLP Majalengka

Sumber : Hasil analisis, 2022

Desa/Kelurahan	Sarana SD	SNI (Radius Pelayanan)	Jarak Berjalan kaki (Walking Distance)	Hasil Survei
Babakan Jawa	4	100%	84%	57%
Cibodas	1	95%	31%	44%
Cicurug	2	100%	96%	61%
Cijati	2	97%	88%	67%

Desa/Kelurahan	Sarana SD	SNI (Radius Pelayanan)	Jarak Berjalan kaki (Walking Distance)	Hasil Survei
Cikasarung	3	99%	68%	61%
Kawunggirang	3	100%	88%	59%
Kulur	4	83%	70%	65%
Majalengka Kulon	2	100%	89%	45%
Majalengka Wetan	2	100%	89%	43%
Munjul	1	97%	90%	56%
Sidamukti	1	86%	47%	54%
Sindangkasih	5	91%	78%	42%
Tarikolot	2	100%	70%	52%
Tonjong	2	100%	90%	58%
Rata-Rata		96%	77%	55%
Bantrangsana	2	100%	75%	66%
Bonang	1	100%	76%	27%
Cijurey	1	100%	64%	44%
Jatipamor	1	100%	92%	65%
Jatiserang	2	100%	79%	38%
Karyamukti	2	100%	109%	39%
Leuwiseeng	2	100%	74%	38%
Panyingkiran	2	100%	106%	45%
Pasirmuncang	1	100%	79%	38%
Rata-Rata		100%	84%	44%
Kawunghilir	1	100%	59%	88%
Tajur	2	100%	73%	106%
Cigasong	2	100%	85%	54%
Simpeureum	2	100%	73%	43%
Tenjolayar	2	93%	88%	64%
Kutamanggu	2	100%	66%	50%
Cicenang	1	100%	65%	40%
Baribis	1	100%	65%	56%
Batujaya	2	95%	68%	97%
Karayunan	2	88%	75%	92%
Rata-Rata		98%	72%	69%
		Belum sesuai persyaratan		
		Sesuai persyaratan		

Analisis di Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, dan Cigasong menunjukkan perbedaan antara standar SNI dan walking distance. Di Majalengka dan Cigasong, beberapa desa seperti Cibodas, Cijati, Kulur, dan lainnya belum memenuhi standar SNI untuk akses SD, tapi sesuai walking distance. Di Panyingkiran, semua desa sesuai SNI, namun Karyamukti dan Panyingkiran melebihi jarak walking distance. Survei menunjukkan hanya 44-69% masyarakat menggunakan sekolah di daerahnya, karena memilih kedekatan sekolah di luar wilayah administrasi. Ini menunjukkan pemanfaatan fasilitas pendidikan di PKLP Majalengka belum sepenuhnya sesuai standar SNI dan teori walking distance.

Tabel 5. Komparasi fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan pendekatan spasial dengan hasil survei penyebaran kuisisioner PKLP Majalengka

Sumber : Hasil analisis, 2022

Desa/Kelurahan	Sarana SMP	SNI (Radius Pelayanan)	Jarak Berjalan kaki (Walking Distance)	Hasil Survei
Babakanjawa	0	0%	0%	1%
Cibodas	1	100%	55%	1%
Cicurug	0	0%	0%	2%
Cijati	0	0%	0%	1%
Cikasarung	1	100%	60%	2%
Kawunggirang	0	0%	0%	2%
Kulur	0	0%	0%	3%
Majalengka Wetan	2	100%	81%	2%
Majalengka Kulon	2	100%	69%	1%
Munjul	1	100%	72%	2%
Sidamukti	0	0%	0%	1%
Sindangkasih	0	0%	0%	5%
Tarikolot	0	0%	0%	1%
Tonjong	0	0%	0%	0%
Rata-Rata		34%	24%	2%
Cijurey	0	0%	0%	3%
Pasirmuncang	0	0%	0%	0%
Jatipamor	0	0%	0%	3%
Bantrangsana	0	0%	0%	0%
Jatiserang	1	100%	75%	3%
Bonang	0	0%	0%	2%
Leuwiseeng	0	0%	0%	4%
Karyamukti	1	100%	57%	5%
Panyingkiran	0	0%	0%	4%
Rata-Rata		22%	15%	3%
Kawunghilir	0	0%	0%	0%
Tajur	0	0%	0%	0%
Cigasong	0	0%	0%	3%
Simpeureum	1	100%	73%	2%
Tenjolayar	0	0%	0%	3%
Kutamanggu	0	0%	0%	2%
Cicenang	0	0%	0%	3%
Baribis	0	0%	0%	3%
Batujaya	0	0%	0%	0%
Karayunan	0	0%	0%	0%
Rata-Rata		10%	7%	2%
		Belum sesuai persyaratan		
		Sesuai persyaratan		

Akses SMP di Majalengka, Panyingkiran, dan Cigasong belum memenuhi standar SNI dan walking distance. Di Majalengka, desa seperti Cibodas dan Sidamukti hanya 34% terlayani SNI, 24% sesuai walking distance, tapi hanya 2% masyarakat menggunakan fasilitas dekat permukiman. Di Cigasong, hanya Desa Simpeureum yang memenuhi standar dengan 10% terjangkau SNI dan 7% walking distance, namun pemanfaatan hanya 2%. Di Panyingkiran, Desa Jatiserang dan Karyamukti memenuhi standar dengan 22% terjangkau SNI dan 15% walking distance, tapi hanya 3% pemanfaatan. Masyarakat cenderung memilih sekolah berdasarkan jarak dan waktu tempuh tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas fasilitas.

Tabel 6. Komparasi fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas berdasarkan pendekatan spasial dengan hasil survei penyebaran kuisioner PKLP Majalengka

Sumber : Hasil analisis 2021

Desa/Kelurahan	Sarana SMA	SNI (Radius Pelayanan)	Jarak Berjalan Kaki (Walking Distance)	Hasil Survei
Babakanjawa	0	0%	0%	1%
Cibodas	0	0%	0%	0%
Cicurug	0	0%	0%	0%
Cijati	0	0%	0%	0%
Cikasarung	0	0%	0%	0%
Kawunggirang	0	0%	0%	2%
Kulur	0	0%	0%	2%
Majalengka Wetan	0	0%	0%	2%
Majallengka Kulon	2	100%	72%	1%
Munjul	0	0%	0%	0%
Sidamukti	0	0%	0%	2%
Sindangkasih	0	0%	0%	4%
Tarikolot	0	0%	0%	1%
Tonjong	0	0%	0%	0%
Rata-Rata		7%	5%	1%
Cijurey	0	0%	0%	0%
Pasirmuncang	0	0%	0%	0%
Jatipamor	0	0%	0%	2%
Bantrangsana	0	0%	0%	2%
Jatiserang	0	0%	0%	2%
Bonang	0	0%	0%	2%
Leuwiseeng	0	0%	0%	3%
Karyamukti	1	100%	46%	5%
Panyingkiran	0	0%	0%	3%
Rata-Rata		11%	5%	2%
Kawunghilir	0	0%	0%	0%
Tajur	0	0%	0%	0%
Cigasong	0	0%	0%	3%
Simpeureum	0	0%	0%	3%
Tenjolayar	0	0%	0%	0%
Kutamanggu	0	0%	0%	2%

Desa/Kelurahan	Sarana SMA	SNI (Radius Pelayanan)	Jarak Berjalan Kaki (Walking Distance)	Hasil Survei
Cicenang	1	100%	64%	2%
Baribis	0	0%	0%	3%
Batujaya	0	0%	0%	0%
Karayunan	0	0%	0%	0%
Rata-Rata		10%	6%	1%
Belum sesuai persyaratan				
Sesuai persyaratan				

Akses SMA di Majalengka dan Cigasong belum memenuhi standar SNI, hanya Majalengka Kulon, Cicenang, dan Karyamukti yang sesuai walking distance. Namun, survei menunjukkan hanya 1-2% masyarakat di ketiga kecamatan tersebut yang menggunakan sekolah dekat permukiman, karena memilih sekolah berdasarkan jarak dan waktu tempuh tanpa mempertimbangkan kualitas fasilitas.

4. Kesimpulan

Sebaran fasilitas pendidikan di PKLP Majalengka (Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Cigasong) terdiri dari 41 titik yang terpusat di tengah kecamatan dan wilayah padat penduduk, dengan ketersediaan kurang di daerah pinggiran. Sebagian besar Desa/Kelurahan terlayani SD, namun ada beberapa desa yang belum terlayani SMP dan SMA. Pada SD, siswa dan orang tua lebih memilih sekolah dekat rumah, sementara di SMP dan SMA pilihan lokasi lebih beragam, sering dipengaruhi aksesibilitas dan fasilitas pendukung. Masyarakat PKLP Majalengka masih belum memanfaatkan fasilitas pendidikan secara optimal karena akses belum memenuhi standar SNI dan walking distance, serta lebih mengutamakan kedekatan sekolah di luar batas administrasi tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas sekolah.

Referensi

- Endang, & Dkk. (2014). Evaluasi Faktor-Faktor Penentu Lokasi Fasilitas Pendidikan. Evaluasi Faktor-Faktor Penentu Lokasi Fasilitas Pendidikan.
- Nurkholis. (2013). PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto. 1(1), 24-44.
- Porteous, J. Douglas. (1977). Environment and Behaviour: Planning and Everyday Urban Life. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(1), 38-52.2019.
- Sugiar, G. (2019). KAJIAN KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN BERDASARKAN TEORI NEIGHBORHOOD UNIT DI PUSAT KEGIATAN PERKOTAAN SUMEDANG.
- Yuchi, M. (2020). Evaluasi Sebaran Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Teori Neighborhood Unit.
- SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Standar dan ketentuan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kawasan Perkotaan.